



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOSE ARIF LUKITO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 766327

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 451.500.000

1. MOTOR, HONDA LEGENDA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
2. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
4. LAINNYA, SEPEDA POLYGON POLYGON Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. LAINNYA, SEPEDA POLYGON STRATTOS 4 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
6. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
8. MOBIL, KIA CARENS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.073.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.498.073.000
III. HUTANG	Rp.	357.933.198
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.140.139.802

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTARNO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 789860

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 575.000.000

1. Tanah Seluas 668 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 455.900.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 A/T (VARIO) Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
6. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 AIR BAGS Tahun 2024, HIBAH TANPA AKTA Rp. 353.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.379.811

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.092.529.811

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.092.529.811



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD RUSTANDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 624361

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 536.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414FDX MT (ERTIGA GL) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.648.120

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 688.148.120

III. HUTANG Rp. 49.938.037

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 638.210.083

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI PURWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 996167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.034.840
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	801.034.840

III. HUTANG **Rp.** **525.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **276.034.840****Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCH. FAISOL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK : 116354

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.034.351.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 957.126.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 1.162.225.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 133 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 150.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY BEBK MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, YAMAHA YAMAHA XSR 155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 71.920.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 20.421.539



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	167.887.064
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.444.579.603
III. HUTANG	Rp.	320.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.124.579.603

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN HENDRO CAHYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI**
3. NHK : **912693**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/105 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **319.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA CT70 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO SPRINT IGET 150 ABS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **49.700.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **10.500.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.079.200.000
III. HUTANG	Rp.	288.218.503
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.790.981.497

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PURNOMO**
2. Jabatan : **PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA**
3. NHK : **767079**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.666.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 616 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 1497 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/160 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 646.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **304.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV HRV MANUAL 1500 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000



4. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

5. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 600.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.970.600.000

III. HUTANG Rp. 740.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.230.600.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.